

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG Sarana dan Prasarana, dan Sistem
KOMUNIKASI Pencarian dan Pertolongan

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAKHRIZET
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG Sarana dan Prasarana, dan Sistem
Pencarian dan Pertolongan
3. NHK : 796122

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.175.000.000
1. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI		
Rp. 1.800.000.000		
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI		
Rp. 1.500.000.000		
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI		
Rp. 1.550.000.000		
4. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA AGAM, HASIL SENDIRI		
Rp. 325.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	510.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 115.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA YARIS PENUMPANG Tahun 2011, HASIL SENDIRI		
Rp. 70.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 325.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	340.000.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	603.351.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.628.351.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.628.351.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.